BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia mempunyai naluri untuk memiliki pasangan hidup dan melestarikan keberadaannya dengan melahirkan keturunan dan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Dalam ketentuan Pasal 288 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa:

Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: “Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.” Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: “Anak adalah seseorang yang

¹Jatmiko Winarno, “Akibat Hukum Pengangkatan Anak”, *Jurnal Independent 1*, Volume 1, 2013, hlm. 2, <http://journal.unisla.ac.id/pdf/116122013/Jatmiko%20W.pdf>.

belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus generasi penerus bangsa yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan sebuah negara.²

Pada masyarakat *unilateral-patrilineal* tidak mempunyai keturunan laki-laki sama halnya dengan masyarakat *unilateral-matrilineal* tidak mempunyai keturunan perempuan bukan sekedar persoalan bagi pasangan suami istri, melainkan juga menjadi persoalan bagi seluruh kerabatnya, karena sifat komunal yang membawa hubungan dan ikatan yang erat antara perseorangan dengan keluarganya.³

Di dalam masyarakat Indonesia mengangkat seorang anak merupakan salah satu solusi yang sering dipilih oleh pasangan suami istri yang merindukan kehadiran seorang anak. Peraturan Pemerintah juga menjelaskan mengenai pengangkatan anak dalam Pasal 1 Angka 1 menyatakan bahwa: “Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.”

²Mashuril Anwar, M. Ridho Wijaya, “Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang”, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2019, hlm. 267, <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/76>

³Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 40.

Tujuan dari pengangkatan anak antara lain adalah untuk meneruskan keturunan kala di dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Ini merupakan motivasi yang dapat dibenarkan dan salah satu jalan keluar dan alternatif yang positif. Untuk memberikan pengertian tentang adopsi, dapat membedakan dari dua sudut pandangan, yaitu pengertian secara etimologi dan secara terminologi :

1. Secara Etimologi

Adopsi berasal dari kata '*adoptie*' bahasa Belanda, atau '*adopt*' *adoption* bahasa Inggris, yang berarti pengangkatan anak, mengangkat anak. Pengertian dalam bahasa Belanda menurut Kamus Hukum, berarti pengangkatan seorang anak untuk sebagai anak kandungnya sendiri.⁴

2. Secara Terminologi

Dari segi terminologi, adopsi diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijumpai arti anak angkat yaitu, "anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri."⁵ Adopsi, suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁶

Anak angkat diberikan definisi sebagai berikut: "Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau

⁴Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Cet. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 4.

⁵Jhon M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1981, hlm. 13.

⁶*Ibid.*

orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.”⁷

Pengangkatan anak yang harus dilakukan oleh orang tua angkat wajib berdasarkan pada pengesahan atau pengukuhan yang dikeluarkan oleh hakim di pengadilan, hal ini sesuai dengan isi dari Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu:

“Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (a), meliputi:

- a. pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat;
- b. pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 9:

- (1) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (a), yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat,
- (2) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan.

Pasal 10:

- (1) Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (b) mencakup pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak.
- (2) Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

⁷H. Ahmad Kamil & H.M Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada , Jakarta, 2008, hlm. 55.

Otje Salman Soemadiningrat berpendapat tentang hukum adat, yaitu:

Hukum adat tentu membutuhkan pengakuan melalui Hukum negara (hukum positif, menurut Austin diartikan sebagai hukum yang dibuat oleh orang atau lembaga-lembaga yang memiliki kedaulatan, dan pengakuan tersebut diberlakukan terhadap anggota-anggota masyarakat politik yang merdeka (*Independent Political society*). Anggota masyarakat tersebut mengakui kedaulatan atau supremitas yang dimiliki orang atau lembaga-lembaga pembuat hukum yang bersangkutan. Dengan demikian, kebiasaan menurutnya hanya akan berlaku sebagai hukum jika undang-undang menghendaki atau menyatakan dengan tegas atas keberlakuan kebiasaan tersebut.⁸

Keberpihakan pengadilan pada hukum adat baru akan terlihat ketika putusan para hakim pengadilan telah menunjukkan segala sesuatu yang ada dalam hidup kemasyarakatan yang telah mendapatkan bentuk sebagai hukum. Artinya setiap putusan pengadilan itu mencerminkan kepastian yang memiliki akibat hukum (*rechtsgevolgen*) berbentuk pemaksaan (*dwang*) atau kepastian hukum bentuk lainnya.⁹

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak memang dapat melalui pengangkatan anak secara adat, namun dalam pengangkatan anak secara adat tersebut juga perlu melalui pengadilan guna memiliki akibat hukum (*rechtsgevolgen*) yang berbentuk *dwang* (pemaksaan). Pemaksaan (*dwang*) yang dimaksud dalam hal ini adalah untuk membuat orang tua asuh anak tersebut tetap menjalankan tanggung jawabnya sebagai orang tua angkat dan memberi hak asuh yang baik terhadap anak angkatnya tersebut.

⁸Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 2.

⁹Yanis Maladi, "Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen", *Mimbar Hukum*, Volume 22, Nomor 3, 2010, hlm. 357, https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5%q=eksistensi+hukum+adat&oq=#d=g_s_qabs%u=%23p%3D54DS07zv5HIJ

Tabel
Data Jumlah Kasus Pengangkatan Anak Ilegal di Rumah Sakit di Kota Jambi Dari Tahun 2019

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2019	13

Sumber: Berdasarkan beberapa Rumah Sakit di Wilayah Kota Jambi.

Berdasarkan data di atas dapat kita lihat bahwa jumlah pengangkatan anak secara ilegal tanpa melalui proses pengadilan mengalami peningkatan setiap tahunnya, data diatas juga menjadi salah satu bukti yang menunjukkan terdapat beberapa kasus pengangkatan anak ilegal masih kerap terjadi di Kota Jambi yang mana kasus tersebut tidak sampai pada tingkat kepolisian sehingga tidak dapat diproses sebagaimana peraturan yang berlaku di Indonesia, bilamana bagi setiap orang yang melakukan pengangkatan anak secara ilegal akan dikenai sanksi pidana sesuai dengan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yaitu: “Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa:

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
- (2a) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal anak.
- (3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- (4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- (4a) Dalam hal anak tidak diketahui asal usulnya, orang yang akan mengangkat anak tersebut harus menyertai identitas anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (4).
- (5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Berdasarkan isi pada Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, menyatakan bahwa kepada orang tua angkat wajib untuk memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang kandungnya, tentu dengan memperhatikan kesiapan mental maupun kejiwaan dari anak angkat yang bersangkutan, setelah anak tersebut dewasa atau pada saat anak angkat tersebut menjelang menikah, dengan cara memberikan pengertian baik dari aspek psikologis dan agama, agar sang anak dapat terhindar dari pernikahan sedarah. Namun yang sering terjadi bahwa orang tua angkat berusaha menyembunyikan identitas orang tua kandung anak yang diangkatnya, sehingga dikemudian hari menimbulkan problema tersendiri terutama bagi kepentingan anak angkat dan dapat menjadikan keaburan identitas manusia.

Pengangkatan anak secara ilegal dan penyimpangan terhadap pengangkatan anak yang telah diangkat juga masih dijumpai, dengan berbagai faktor dan alasan

yang mendorong. Hal tersebut harus diatasi dengan melakukan perlindungan terhadap hak-hak anak yang harus tetap diperjuangkan guna meningkatkan kesadaran bangsa untuk menghargai hak-hak anak dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan kepedulian masyarakat agar berperan aktif melindungi anak dari segala macam bentuk gangguan terhadap kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya.¹⁰ Masyarakat di Indonesia pada umumnya lebih suka mengambil atau mengangkat anak dari kalangan keluarga sendiri atau dari orang yang masih ada berhubungan darah langsung dengan mereka, sering tanpa surat adopsi yang ditetapkan melalui pengadilan. Eksistensi pengangkatan anak di Indonesia sebagai suatu lembaga hukum masih belum sinkron, sehingga masalah pengangkatan anak masih merupakan problema bagi masyarakat. Ketidaksinkronan itu sangat jelas dilihat, kalau kita mempelajari ketentuan tentang eksistensi lembaga adopsi itu sendiri dalam sumber-sumber yang berlaku di Indonesia. Masalah pengangkatan anak bukanlah masalah baru, termasuk di Indonesia.

Dalam masyarakat pengangkatan anak secara ilegal dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan antar pihak orang tua yang mengangkat dengan orang tua kandung anak yang diangkat, tanpa berdasarkan syarat pada lembaga yang mengatur bahkan tanpa melalui putusan pengadilan. Pengangkatan anak atau

¹⁰Sherly Livinus, Mety Rahmawati, "Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus: Penganiayaan Anak Adopsi Di Hotel Le Meridien Jakarta Pusat Oleh Cw)", *Jurnal Hukum Adigama*, Volume I, 2013, hlm. 4, <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/2141>.

adopsi secara ilegal inilah yang disinyalir sebagai celah untuk kasus jual beli anak (*trafficking*),¹¹ keinginan untuk menyelamatkan anak dari ancaman *trafficking* didasari pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional dan internasional, untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerja sama dan perbuatan inilah yang harus dihindari melalui peraturan yang ketat dalam melakukan pengangkatan anak.¹²

Peraturan mengenai tata cara dan akibat hukum dari pengangkatan anak itu sendiri juga bersifat pluralistik atau beragam di Indonesia. Masing-masing etnis dan golongan penduduk mempunyai aturan sendiri mengenai prosedur dan akibat hukum pengangkatan anak. Keanekaragaman ini sering menyebabkan ketidakpastian dan masalah hukum yang tidak jarang menjadi sengketa pengadilan. Eksistensi adopsi di Indonesia sebagai suatu lembaga hukum masih belum sinkron, sehingga masalah adopsi masih merupakan problema bagi masyarakat, terutama dalam masalah yang menyangkut ketentuan hukumnya.¹³

Pengangkatan anak melalui proses pengadilan merupakan proses terakhir di dalam kepastian hukum dari pengangkatan anak, penetapan pengadilan

¹¹Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, PT. Ghalia, Bandung, 1986, hlm. 28.

¹²Sukirno, Siti dan Jumadi, "Sistem Sanksi Perdagangan Anak Menurut Hukum Islam", *Jurnal Diskursus Islam*, Volume 6, Nomor 2, 2018, hlm. 311, <http://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/850418>.

¹³Surjanti, "Akibat Hukum Dan Sanksi Pidana Pengangkatan Anak Secara Ilegal", *Jurnal YUSTITIABELEN*, Volume I, 2015, hlm. 65, <http://www.jurnal-unita.org/index.php/yustitia/article/view/54>.

merupakan bukti bahwa pengadilan lebih berperan dari pada akta notaris dan hukum adat.

Kasus tersebut rentan terjadi lagi terhadap anak yang lain, salah satu lagi bentuk perdagangan anak yaitu penjualan anak berkedok adopsi yang dimaksudkan untuk kepentingan mendapatkan keuntungan besar bagi pelaku perdagangan orang,¹⁴ sehingga setelah terjadinya adopsi tidak ada kepastian tentang kehidupan anak angkat tersebut akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan dan sesuai dengan kebutuhan sang anak, atau apakah anak tersebut mendapatkan hak-hak yang dibutuhkan.

Praktik adopsi bayi ilegal di sejumlah rumah sakit diakui seorang dokter terkemuka di Kota Jambi. Dokter mengatakan praktik tersebut dilakukan bagian kebidanan rumah sakit. Orang tua angkat memang memberikan sejumlah uang kepada bidan atau petugas rumah sakit tersebut.¹⁵ Anak dapat menjadi objek tawar-menawar seperti dalam dunia perdagangan, penyerahan uang sebagai imbalan kepada yang punya anak dan mereka yang telah berjasa dalam melancarkan pengangkatan merupakan petunjuk adanya sifat bisnis pengangkatan anak.

Proses Pengangkatan anak secara ilegal pernah saya ketahui terjadi pada tahun 2019. Pada saat itu saya bekerja sebagai perawat di bidang persalinan di salah satu rumah sakit di Kota Jambi. Kejadian yang terjadi pada saat itu adalah Ibu kandung anak tersebut merupakan seorang *singleparent* (orang

¹⁴Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Ctk Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012 hlm. 6.

¹⁵<https://jambi.tribunnews.com/2015/06/23/waduh-praktik-adopsi-anak-di-sudah-jadi-rahasia-umum-di-rs-jambi>, diakses Pada Tanggal 01 Oktober Pukul 12.52 WIB.

tua tunggal) yang ditinggal oleh suaminya sejak 6 (enam) bulan pernikahan. Pada saat proses persalinan ibu tersebut hanya didampingi oleh saudara perempuannya, keesokan harinya setelah bayi itu lahir datanglah sepasang suami istri untuk mendatangi ibu tersebut didampingi salah satu dokter di rumah sakit tersebut. Kemudian sepasang suami istri tersebut melakukan transaksi dan menandatangani sebuah perjanjian yang telah dipersiapkan mereka dengan melakukan kesepakatan terlebih dahulu sejak bayi tersebut masih didalam kandungan yang salah satu pasalnya menyatakan bahwa ibu tersebut telah menyerahkan secara sepenuhnya hak asuh anak tersebut kepada sepasang suami istri tersebut. Pada saat itu saya yang menjadi salah satu saksi dari perjanjian tersebut. Lalu Ibu kandung dari anak tersebut meninggalkan rumah sakit pada sore harinya dan sepasang suami istri itu membawa bayi tersebut pada keesokan harinya dari rumah sakit.¹⁶

Berdasarkan wawancara di atas yang dilakukan oleh penulis terhadap salah satu perawat di salah satu rumah sakit di Kota Jambi menunjukkan adanya ketidaksesuaian secara hukum terhadap pemberian hak asuh kepada anak tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengangkatan anak secara ilegal itu merupakan perbuatan yang sulit untuk dibuktikan dan sering terjadi bagi masyarakat yang tidak terlalu memahami hukum dan dengan mudah melakukan perbuatan hukum yang pada dasarnya belum diketahui bagaimana dasar hukum dari perjanjian tersebut.

Sehubungan dengan ini, maka harus dicegah pengangkatan anak secara ilegal karena perbuatan ini bertentangan dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak bahwa: “Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan

¹⁶Wawancara dengan Seorang Perawat, Pada Tanggal 23 Maret 2021.

berkembang dengan wajar.” Karena hal itu sudah bertentangan dengan asas dan tujuan pengangkatan anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak mengatur tentang pelaksanaan pengangkatan anak secara umum dan bagi segala golongan penduduk. Dengan berlakunya peraturan pemerintah ini juga dimaksudkan agar pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang pada akhirnya dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak demi masa depan dan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah di atas penulis merasa tertarik dengan undang-undang yang mengatur tentang pengangkatan anak di Indonesia, oleh karena itu penulis tertarik dan mengangkatnya menjadi sebuah skripsi dengan judul “**Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengangkatan Anak Secara Ilegal Di Kota Jambi**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka pokok masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pengangkatan anak secara ilegal di Kota Jambi?
2. Apakah kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap pengangkatan anak secara ilegal di Kota Jambi?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum pidana mengenai pengangkatan anak secara ilegal di Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dihadapi penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum pidana terhadap pengangkatan anak secara ilegal di Kota Jambi.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian antara lain:

a. Secara teoretis

Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk akademis, dan sebagai titik tolak sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum dalam menambah bahan Hukum Pidana, khususnya tentang pengangkatan anak ilegal yang marak terjadi dan dilakukan di dalam kalangan masyarakat.

b. Secara Praktis

Dari sisi praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan atau masukan dan memberikan sumbangan saran maupun sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak terkait.

D. Kerangka Konseptual

Guna mengetahui dan memahami maksud judul skripsi ini dan untuk mempermudah dalam membahas permasalahan serta untuk menghindari penafsiran yang berbeda, maka penulis perlu menjelaskan beberapa konsep yang berkaitan dengan judul skripsi ini, yaitu:

1. Penegakan Hukum

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa: “Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum menjadi kenyataan”.¹⁷

2. Pengangkatan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak dalam Pasal 1 angka (1) menjelaskan: “Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orangtua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkat.”

¹⁷Sajipto Raharjo, *Masaalah Penegakan Hukum*, Sinar Biru, Bandung, 1983, hlm. 24.

3. Ilegal

Pengertian ilegal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Tidak legal, tidak menurut hukum atau tidak sah.”¹⁸ Ilegal dalam bahasa Latin disebut *Illegitium* artinya tidak sah.¹⁹

Dari uraian beberapa konsep di atas, maka pengertian judul skripsi ini yang penulis maksud adalah penegakan hukum pidana terhadap pengangkatan anak secara ilegal di Kota Jambi.

E. Landasan Teoretis

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum di kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku.

¹⁸<https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/ilegal.html>, diakses Pada Tanggal 09 April 2020, Pukul 23.30 WIB.

¹⁹Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, hlm. 466.

Tidak berlakunya peraturan dengan baik dalam masyarakat berarti tidak meningkatkan tingkat kesadaran serta kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang ada. Hal tersebut dapat digolongkan sebagai gangguan dalam penegakan suatu hukum atau peraturan. Dalam hal tegaknya suatu peraturan dalam teori efektivitas hukum dipengaruhi oleh 5 faktor atau indikator utama yakni substansi atau hukum itu sendiri, penegak hukum yang dapat menjalankan wewenangnya secara potensial, fasilitas hukum yang dapat mendukung berlakunya hukum dengan baik dan benar, masyarakat serta kebiasaan-kebiasaannya dan budaya-budaya yang telah lama menjadi bagian dari masyarakat dalam melakukan tindakan-tindakan hukum. Kelima indikator sebagaimana yang dipaparkan tersebut merupakan indikator netral yang dapat diartikan bahwa indikator tersebut digunakan untuk mengukur atau menganalisis dampak dari suatu peraturan yakni berlaku efektif atau tidak dalam menambah kesadaran maupun kepatuhan masyarakat.

1. Faktor Undang-Undang

Dalam hukum tentu terdapat norma ataupun peraturan yang diatur sedemikian rupa dan dibuat sejelas mungkin guna lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Faktor hukum yang meliputi norma ataupun peraturan dapat dibagi atas dua macam yaitu peraturan yang berlaku umum atau peraturan yang berlaku khusus di daerah-daerah tertentu.

2. Faktor Penegak Hukum

Yang dimaksud dengan orang yang tergolong dalam pihak penegak hukum ialah pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembentukan sampai pada tahap pelaksanaan suatu peraturan. Pihak-pihak yang memiliki kedudukan serta kewenangan dalam suatu peraturan yang berlaku adalah pihak yang dapat dikategorikan sebagai penegak hukum baik bersifat praktis maupun non praktis, hal tersebut sebagaimana penegak hukum yang dimaksud dalam teori efektivitas hukum. Dalam hal berlaku efektifnya suatu peraturan dalam masyarakat dapat ditinjau dari peranan penegak hukum dalam menggunakan kedudukan dan peranannya dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat.

3. Faktor Fasilitas dan Sarana

Suatu peraturan dalam pelaksanaannya akan cenderung lancar jika didukung oleh sarana yang memadai dan segala kebutuhan demi tegaknya suatu peraturan terpenuhi. Dalam hal untuk mewujudkan sampainya regulasi kepada masyarakat hendaklah kualitas dari orang yang memiliki wewenang untuk menyampaikan regulasi tersebut harus mumpuni, kualitas bukan menjadi hal penting satu-satunya yang dapat menjadi faktor penunjang namun banyaknya jumlah orang yang berwenang tersebut juga menjadi hal yang sangat berarti, lengkapnya peralatan yang dapat menunjang penyampaian regulasi dengan baik

serta hal penting adalah biaya yang memadai. Terpenuhinya sarana atau fasilitas tersebut di atas merupakan penunjang tegaknya suatu peraturan secara maksimal dalam suatu masyarakat.

4. Faktor Masyarakat

Dalam menjaga keadaan masyarakat supaya tetap utuh, serasi serta tetap terjadi pembaharuan-pembaharuan ke arah yang lebih baik serta dapat memperlancar proses interaksi sosial adalah salah satu fungsi hukum. Hal tersebut sama dengan hilangnya kekacauan serta berkurangnya angka perbuatan yang bertentang dengan hukum adalah hakikat dari berlakunya hukum secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

5. Faktor Kebudayaan

Hal yang biasa dikenal sebagai budaya hukum yakni kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dalam suatu hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat hendaklah memenuhi norma-norma guna hukum itu dapat berperan sebagaimana mestinya seperti suatu norma itu harus mengandung unsur yang dapat menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, norma harus menjamin terwujudnya ketentraman, norma harus menjamin keselamatan jasmani maupun rohani setiap diri individu dalam masyarakat serta harus memiliki norma yang tetap fleksibel untuk dilakukan pembaruan atau mendukung adanya inovasi-inovasi yang

mengarah ke perubahan yang baik. Budaya yang menghiasi sendi-sendi masyarakat merupakan pedoman masyarakat untuk mengerti dan bertindak dalam berinteraksi.²⁰

b. Teori Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum adalah: “Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur.”²¹

Perlindungan hukum memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hokum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²²

Muktie, A. Fadjar mengatakan bahwa: “Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh

²⁰Soerjono Soekamto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 08

²¹<https://www.merdeka.com/pendidikan/ini-pendapat-andi-hamzah-dan-simanjuntak-soal-perlindungan-hukum.html>, diakses Pada Tanggal 08 Juni 2021, Pukul 22.22 WIB.

²²Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 74.

hukum saja.”²³ Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.²⁴

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

c. Teori Perlindungan Anak

Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan undang-undang khusus mengenai perlindungan anak yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut diadakan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan anak bahwa seluruh anak berhak mendapatkan perlindungan secara hukum. Penyelenggaraan perlindungan anak diatur oleh undang-undang dan dalam pelaksanaannya melibatkan peran perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan dan lain-lain. Oleh

²³*Ibid*, hlm. 19.

²⁴<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses Pada Tanggal 30 September Pukul 22.01 WIB.

karena itu, pendidikan anak usia dini merupakan salah satu lembaga pendidikan yang ikut serta dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Perlindungan anak menurut Sir William Blackstone mengatakan bahwa: “Orang tua bertanggungjawab kepada anak-anak mereka, ada tiga tugas: pemeliharaan, perlindungan, dan pendidikan.”²⁵

Dalam pengangkatan anak muncul dua isu yang menjadi sangat penting untuk diperhatikan yaitu: “Pertama, perlu putusan yang mengandung adanya perlindungan terhadap hak-hak anak. Kedua, isu keadilan terhadap anak yang tercermin dari kesanggupan dan kelayakan orang tua angkat, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.”

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan kewajiban bagi kita semua terutama orang tua, mengingat anak sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki peranan strategis dalam mewujudkan cita-cita bangsa,²⁶ oleh sebab itu anak harus mendapatkan hak dan perlindungan sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak termasuk rentan terhadap suatu tindak pidana baik sebagai korban, saksi, maupun sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, oleh sebab itu diperlukan bimbingan dari orang dewasa

²⁵<http://bloghakperlindungananak.blogspot.com/2016/08/apa-pengertian-tentang-hak-perlindungan.html>, diakses Pada Tanggal 03 Agustus 2020, Pukul 10.00 WIB.

²⁶Dheny Wahyudhi , “Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6, Nomor 1, 2015, hlm. 145.

agar anak dapat mengerti dalam hal bertindak di dalam lingkungan masyarakat, sehingga hidupnya jauh dari ancaman bahaya.

Anak angkat tersebut mengambil nama orang tua angkatnya yang baru dan terputuslah hubungan nasab dengan orang tua aslinya. Peristiwa pengangkatan anak merupakan bentuk perpindahan milik, bertukar darah daging, dan keturunan dengan segala konsekuensinya.²⁷

d. Teori Kesadaran dan Ketaatan Hukum

Membangun kesadaran hukum tidaklah mudah, tidak semua orang memiliki kesadaran tersebut. hukum sebagai fenomena sosial merupakan institusi dan pengendalian masyarakat. Di dalam masyarakat dijumpai berbagai intitusi yang masing-masing diperlukan di dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan memperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut, oleh karena fungsinya demikian masyarakat perlu akan kehadiran institusi sebagai pemahaman kesadaran hukum.

Pentingnya kesadaran membangun masyarakat yang sadar akan hukum inilah yang diharapkan akan menunjang dan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi intitusi/ aturan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk mendambakan ketaatan serta ketertiban hukum. Peran dan fungsi membangun kesadaran hukum dalam masyarakat pada umumnya melekat pada intitusi sebagai pelengkap masyarakat dapat dilihat dengan: 1) Stabilitas, 2) Memberikan kerangka sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan

²⁷H. Ahmad Kamil & H.M Fauzan, *Op.Cit.*, hlm. 55-56.

dalam masyarakat, 3) Memberikan kerangka sosial institusi berwujud norma-norma, beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak sadar akan pentingnya hukum adalah: 1. Adanya ketidak pastian hukum; 2. Peraturan-peraturan bersifat statis; 3. Tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku.²⁸

Ketaatan hukum tidaklah lepas dari kesadaran hukum, dan kesadaran hukum yang baik adalah ketaatan hukum, dan ketidak sadaran hukum yang baik adalah ketidak taatan. Pernyataan ketaatan hukum harus disandingkan sebagai sebab dan akibat dari kesadaran dan ketaatan hukum. Sebagai hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara kesadaran hukum dan ketaataan hukum maka beberapa literatur yang di ungkap oleh beberapa pakar mengenai ketaatan hukum bersumber pada kesadaran hukum, hal tersebut tercermin dua macam kesadaran, yaitu: 1. Legal consciouness as within the law, kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadari atau dipahami; 2. Legal consciouness as against the law, kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum.²⁹ Hukum berbeda dengan ilmu yang lain dalam kehidupan manusia, hukum berbeda dengan seni, ilmu dan profesionalis lainnya, struktur hukum pada dasarnya berbasis kepada kewajiban dan tidak diatas komitmen. Kewajiban moral untuk mentaati dan

²⁸Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra aditya Bakti, Bandung, 1991, Edisi Revisi, hal.112.

²⁹*Ibid.* hlm. 21.

peranan peraturan membentuk karakteristik masyarakat. Di dalam kenyataannya ketaatan terhadap hukum tidaklah sama dengan ketaatan sosial lainnya, ketaatan hukum merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan akan timbul sanksi, tidaklah demikian dengan ketaatan sosial, ketaatan sosial manakala tidak dilaksanakan atau dilakukan maka sanksi-sanksi sosial yang berlaku pada masyarakat inilah yang menjadi penghakim. Tidaklah berlebihan bila ketaatan di dalam hukum cenderung dipaksakan.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Jambi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Jambi.

2. Metode Pendekatan

Tipe penelitian yang digunakan dalam objek penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis empiris dengan cara mengkaji tentang apa yang ada dan tampak dari penerapan peraturan perundang-undangan.³⁰

Dalam penelitian ini menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara

³⁰Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Salemba Humanika, Jakarta, 2010, hlm. 64.

memadukan bahan-bahan hukum yakni peraturan perundang-undangan dan data yang diperoleh dilapangan Wilayah Kota Jambi

3. Spesifikasi Penelitian

Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau hubungan antara fanomena yang diuji. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah menghasilkan gambaran akurat tentang sebuah kelompok, menggambarkan mekanisme sebuah proses atau hubungan, memberikan gambaran lengkap baik dalam bentuk verbal maupun numerikal, menyajikan informasi dasar akan suatu hubungan, menciptakan seperangkat kategori dan mengklasifikasikan subjek penelitian, menjelaskan seperangkat tahapan dan proses, serta untuk menyimpan informasi bersifat kontradiktif mengenai subjek penelitian.³¹

4. Tata Cara Penarikan Sampel

Penulis skripsi dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive sampling* (sampel bertujuan), artinya memilih berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur, atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi,³² berhubungan dengan ciri-ciri karakter dapat berupa pengetahuan,

³¹Lexi J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, P.T Remaja Karya, Bandung, 2006, hlm. 38.

³²Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008, hlm. 159-160.

pengalaman, pekerjaan dan atau jabatannya yang bersangkutan dengan masalah penelitian. Adapun yang menjadi sampel respondennya yaitu:

1. 1 orang pegawai Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Jambi.
 2. 1 orang Anggota Polisi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), dan.
 3. 1 orang perawat Rumah Sakit Bersalin di Kota Jambi.
 4. 1 orang tua angkat.
5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpul data yang dipergunakan penulis dalam mengumpulkan data penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara yaitu usaha pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab terhadap para narasumber yang telah ditentukan dan berkaitan dengan kegiatan penelitian ini.

6. Sumber Data

a. Data Primer

Merupakan data lapangan yang diperoleh secara langsung melalui wawancara atau data yang didapatkan dari narasumber.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang didapatkan melalui bahan-bahan pustaka antara lain:

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan diperoleh dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- b) Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer, berupa hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini, baik dalam bentuk jurnal, artikel, dan tulisan pakar hukum lainnya yang berkaitan dengan pengangkatan anak secara ilegal.
- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.

7. Analisis Data

Dari data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder, selanjutnya penulis menganalisis dan mengklasifikasikan secara kualitatif dan dibahas dalam bentuk penjabaran secara tertulis, dan kemudian dibuat kesimpulan dalam bentuk pernyataan yang disusun dalam bentuk deduktif dalam bab pembahasan skripsi nantinya.

G. Sistematika Penulisan

Adapun penulisan skripsi ini didasarkan pada sistematika penulisan sederhana, yang bertujuan untuk memperjelas permasalahan-permasalahan yang ada yang akan dibahas pada bab selanjutnya. Untuk lebih terarah penulisan

skripsi ini. Maka penulis menyusunnya kedalam empat bab, tiap-tiap bab diperincikan kebagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan, penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab II TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM DAN
TINDAK PIDANA PENGANGKATAN ANAK SECARA
ILEGAL**

Bab ini berisikan tinjauan umum mengenai pengertian anak angkat secara umum ataupun menurut para ahli, aspek pengangkatan anak meliputi prosedur dan prinsip pengangkatan anak, syarat-syarat sebagai orang tua angkat dan syarat untuk menjadi anak angkat, akibat hukum mengenai pengangkatan anak (adopsi), dan sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan pengangkatan anak secara ilegal di Kota Jambi.

**Bab III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGANGKATAN ANAK
SECARA ILEGAL DI KOTA JAMBI**

Pada bab ini berisikan pembahasan. Penulis melakukan tinjauan hukum mengenai penegakan hukum pidana terhadap pengangkatan

anak secara ilegal di Kota Jambi dan kendala dalam penegakan hukum terhadap pengangkatan anak secara ilegal di Kota Jambi.

Bab IV PENUTUP

Bab terakhir ini berisikan penutup dari keseluruhan isi skripsi ini. Penulis menuliskan kesimpulan berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya dan berdasarkan kesimpulan tersebut penulis kemudian memberikan saran yang berkenaan dengan permasalahan yang ditemui dalam penulisan ini.